



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXX, lahir tanggal 2 Januari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang; sebagai Pemohon I;

XXXXXXX, lahir tanggal 5 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang; sebagai Pemohon II;

Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2020 memberi kuasa kepada **PUJO ADISISWANTO, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**PUJO ADISISWANTO, S.H. NURKHAMID, S.Ag. dan REKAN**" beralamat kantor di Jl. Sukarno-Hatta Pongonan RT 01 RW 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara.

Halaman 1 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Juli 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dalam register perkara Nomor 288/Pdt.P/2019/PA.Mkd. tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 26 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 8 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Citran, RT.003, RW.004, Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 09/Kua.11.08.07/PW.01/VII/2020
Tanggal 15 Juli 2020;

Halaman 2 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal diluar batas yang melanggar norma agama
 4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung Para Pemohon, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suami bernama XXXXXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya, sehingga Para Pemohon dan keluarga calon suami anaknya telah menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 14 Agustus 2020 dan sudah tidak bisa ditunda lagi;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon bernama **Izatul Milati** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** dan ia telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima oleh orang tuanya;
- o Bahwa ia saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suaminya yang bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin**, ia berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga yang baik;
- o Bahwa perkawinya sudah tidak dapat ditunda lagi karena orang tua dan keluarga calon suaminya telah menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 14 Agustus 2020;
- o Bahwa saat ini calon suaminya yang bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** sudah bekerja sebagai buruh dan telah memiliki penghasilan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa ia akan segera melaksanakan perkawinan dengan calon isterinya bernama **Izatul Milati** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, karena usia untuk melaksanakan perkawinan masih kurang menurut undang-undang yang berlaku;
- o Bahwa ia telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pernikahan sehingga ia telah melamar calon isterinya dan lamaranya telah diterima oleh keluarga calon isterinya;

Halaman 5 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pernikahannya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon dan keluarganya telah menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 14 Agustus 2020;
- o Bahwa ia saat ini berstatus sebagai jejak dan calon isterinya berstatus gadis dan calon isteri tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- o Bahwa antara ia dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah karena orang lain yang tidak ada hubungan nasab, hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa ia saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan telah memiliki penghasilan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim keluarga/orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena ia adalah orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;
- o Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon yang bernama **Izatul Milati** yang hendak menikah dengan anaknya yang bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan anaknya sudah sangat akrab sehingga keluarga dan Para Pemohon telah menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 14 Agustus 2020 dan sudah tidak bisa ditunda lagi;

Halaman 6 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anaknya (**Muhamad Zaenal Mudrofin**) sudah melamar anak Para Pemohon yang bernama **Izatul Milati** dan lamarnya telah Para Pemohon terima;
- o Bahwa antara **Muhamad Zaenal Mudrofin** dengan **Izatul Milati** tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Slamet Salman** NIK 3308140201800007. Tanggal 12-03-2018. yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Solikhatun** NIK 3308144508840007. Tanggal 09-09-2012. yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Para Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 38104/TP/2011. tanggal 17 Desember 2011 atas nama **Izatul Milati** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32251/TP/2011. tanggal 7 Desember 2011. atas nama **Muhamad Zaenal Mudrofin** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Izatul Milati**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Kecamatan Bandongan, Desa Ngepanrejo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama **Izatul Milati** tanggal 18 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala MI Al-Islam Bandongan. bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Muhamad Zaenal**

Halaman 8 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Mudrofin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Kecamatan Bandongan, Desa Ngepanrejo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, tertanggal 15 Juli 2020. Nomor: 09/Kua.11.08.01/PW.01/VII/2020. bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.

B. Saksi:

1. **Nur Khakim bin Karim**, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dusun Citran, RT.03, RW.04, Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - o Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon yang bernama **Izatul Milati** yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
 - o Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, saksi sering melihat calon suami anak Para Pemohon sering datang ke rumah Para Pemohon;

Halaman 9 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak Para Pemohon (**Izatul Milati**) sudah dilamar oleh calon suaminya yang bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** dan lamarnya telah di terima oleh Para Pemohon;
 - o Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi antara **Izatul Milati** dengan **Muhamad Zaenal Mudrofin** tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
2. **Latifun bin Darwan**, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Citran, RT.003, RW.004, Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami anak Para Pemohon;
 - o Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon yang bernama **Izatul Milati** yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
 - o Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, saksi sering melihat calon suami anak Pemoho sering datang ke rumah Para Pemohon;

Halaman 10 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



- o Bahwa anak Para Pemohon (**Izatul Milati**) sudah dilamar oleh calon suaminya yang bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** dan lamarnya telah di terima oleh Para Pemohon;
- o Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara **Izatul Milati** dengan **Muhamad Zaenal Mudrofin** tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 11 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Izatul Milati**, lahir tanggal tanggal 26 Oktober 2003, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang

Halaman 12 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. dan P.4 merupakan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Akta

Halaman 13 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran atas nama anak Para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama **Izatul Milati** tersebut belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** sudah berusia 33 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Keterangan Domisili dan fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi telah lulus dari pendidikan dasar dan berdomisili di wilayah Kecamatan Bandongan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi domisili atas nama calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi berdomisili di wilayah Kecamatan Bandongan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Izatul Milati** dengan **Muhamad Zaenal Mudrofin** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Izatul Milati** berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

Halaman 14 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Izatul Milati** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** dan sudah bertunangan / sudah dilakukan lamaran;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sehingga Para Pemohon dan keluarga calon suami anaknya telah menentukan hari pernikahan yaitu tanggal 14

Halaman 15 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dan sudah tidak bisa ditunda lagi;

3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Bandongan akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan

Halaman 16 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama **Muhamad Zaenal Mudrofin** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 17 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria **mukallaf** yaitu orang tersebut sudah **aqil** (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan **baligh** (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang **mukallaf** dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah **mukallaf** karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan telah mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dari mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 18 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Para Pemohon sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 19 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءا فاسد مقدم على جلبا لما

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX tersebut dengan XXXXXXXX meskipun XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suami bernama XXXXXXXX; Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 20 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXXX** untuk menikah dengan calon suami bernama **XXXXXXX** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kota Mungkid pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **H Muhroji, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Pengadilan Agama tersebut,

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Panitera Pengganti

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp ,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Mkd.